

**MEKANISME PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KAWASAN
PERDESAAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**AMAR SUMATRANI ANWAR
NIM. 190802113**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amar Sumatrani Anwar
NIM : 190802113
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Krueng Seumideun, 30 Desember 2001
Alamat : Balee Pineung, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2024
Yang menyatakan



Amar Sumatrani Anwar
NIM. 190802113

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**MEKANISME PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
KAWASAN PERDESAAN PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Amar Sumatrani Anwar

NIM. 190802113

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIDN. 199002282018032001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**MEKANISME PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
KAWASAN PERDESAAN PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh :

AMAR SUMATRANI ANWAR
NIM. 190802113

Pada Hari/Tanggal : **Senin/06 Januari 2025 M**
06 Rajab 1446 H


Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIDN. 199002282018032001

Penguji I,


Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.
NIP :198611122015031005

Penguji II,


Putri Marzaniar, M.P.A.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Pembangunan jalan lingkungan di kawasan perdesaan merupakan salah satu kebutuhan utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mempermudah seluruh kegiatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, selain mempersingkat waktu jarak tempuh kesuatu tempat namun, juga memiliki tujuan meningkatkan mobilitas dan perekonomian masyarakat. Di Indonesia mekanisme pembangunan jalan lingkungan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan”. Dalam setiap pembangunan dilaksanakan tentu mengikuti *Standar Operational Procedure* (SOP) yang berlaku, dalam menjalankan mekanisme. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh sudah menjalankan tahapan Pembangunan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengutamakan visi dan misi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pembangunan Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan nyata. Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme pembangunan jalan sudah sesuai dengan SOP UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun masih terdapat beberapa kendala akibat kekurangan anggaran dan usulan Pembangunan melalui musrenbang yang masih tertunda untuk dilakukan Pembangunan. Dalam upaya menyelesaikan hambatan tersebut, pihak pelaksana selalu mengupayakan kualitas Pembangunan yang maksimal dan evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perencanaan usulan Pembangunan untuk memperoleh hasil yang sempurna.

Kata Kunci: *Mekanisme, Pembangunan, Hambatan, SOP.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Mekanisme Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perdesaan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh" dengan baik. Shalawat serta Salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang istimewa kepada kedua orang tua, teman-teman seperjuangan dan sahabat yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, bimbingan, dan juga akomodasi yang tak terhingga kepada peneliti. Selanjutnya terimakasih juga kepada.


1. Dr. Muji Mulia, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pernerintahan UN AR-Raniry.
2. Muazzinah, B.Sc, MAP, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
3. Dr. Said Amirulkamar, MM, M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Eka Januar, M.Soc.Sc. Selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan waktu dalam memberi bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menuntaskan penelitian ini.

6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan. Kritik dan saran bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan dan semoga dapat memberi manfaat bagi pembaca.
7. Kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh, terkhusus kepada informan yang sudah banyak membantu dalam hal memberikan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
8. Kepada Sahabat terbaik peneliti yang selalu memberi semangat kepada peneliti,
9. Serta kepada seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019.

Peneliti sangat berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan mereka. Dalam setiap hal tentu terdapat kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan Skripsi ini. Kritik dan saran bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan dan semoga dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 20 Juli 2024

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y


Amar Sumatrani Anwar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	10
1.2.1. Identifikasi Masalah	10
1.2.2. Rumusan masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
BAB II.....	13
LANDASAN TEORI.....	13
2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
2.2. Teori Pembangunan.....	17
2.3. Konsep Mekanisme.....	24
2.4. Konsep Jalan Lingkungan.....	25
2.5. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian.....	28
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5. Informan Penelitian	31

3.6.	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1.	Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	35
4.1.1.	Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	36
4.1.2.	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.....	38
4.1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	39
4.2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
4.2.1.	Mekanisme Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perdesaan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	50
4.2.2.	Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.....	63
BAB V	67
PENUTUP	67
5.1.	Kesimpulan	67
5.2.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkim Kota Banda Aceh.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Jalan Teuku Nyak Arief, Kota Banda Aceh.....	7
Gambar 1. Jalan di Dusun Musafir, Gampong Alue Naga, Banda Aceh.....	7
Gambar 3. Jalan Mantri Zainun, Gampong Baro, Kota Banda Aceh	8
Gambar 4. Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh	35
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh.....	38
Gambar 6. Pembangunan Jalan yang tidak merata di Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh	53
Gambar 7. Alur SOP Pembangunan/Peningkatan Jalan	53
Gambar 8. Papan Informasi Anggaran Belanja Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh	58
Gambar 9. Survey Lokasi Usulan Pembangunan (Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.....	62
Gambar 10. Evaluasi Hasil Pembangunan (PHO).....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Evaluasi Hasil Pembangunan (PHO).....	72
--	----

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	73
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	74
Lampiran 4 Instrumen Penelitian.....	75
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jalan lingkungan adalah tempat orang bertemu dan bersosialisasi, jalan menjadi tempat orang-orang untuk berada di luar, khususnya jika rumah mereka kecil. Jalan adalah tempat untuk perdagangan dan pertukaran barang bahkan untuk melakukan pekerjaan.¹

Jalan lingkungan merupakan salah satu infrastruktur yang terpenting pada suatu lokasi adalah memiliki jalan yang memadai. Kondisi kawasan padat penduduk merupakan permasalahan yang sering timbul di perkotaan. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah masalah infrastruktur jalan. Banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dan terbatasnya lahan menyebabkan sangat perlunya bantuan penanganan masalah infrastruktur jalan lingkungan di kawasan tersebut. Untuk perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang terpadu tentu memerlukan survey akan kebutuhan jalan lingkungan tersebut.²

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan, karena jalan merupakan fasilitas penting bagi masyarakat agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. Jalan sebagai sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi,

¹ Yuliasuti, Nany, dan Adinda Sekar Tanjung. "Pengaruh Jalan Lingkungan Sebagai Ruang Interaksi Sosial Terhadap Lingkungan Permukiman Bungur, Jakarta Pusat." *TATALOKA* 13.3 (2011): 190-196.

² Hidayat, A., & Putra, S. G. (2018). Kajian Kondisi Infrastruktur Jalan Lingkungan Di Kawasan Kelurahan 3-4 Ulu Palembang. *Jurnal Teknik Sipil*, 8(2), 57-67.

sosial, budaya dan lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai suatu keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Secara umum pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung nilai-nilai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.³

Jalan Lingkungan Kawasan Perdesaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Menyebutkan bahwa “Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antara permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan”.⁴

Berdasarkan aktivitas berbagai peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan kewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat baik dari tingkat bawah hingga menengah sampai ke tingkat atas. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai *responsive* upaya menciptakan kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Oleh karena itu maka salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan pembangunan jalan lingkungan dengan mempertimbangkan berbagai upaya yang menjadi sebab kebutuhan terhadap kepentingan umum sebagai kewajiban pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar.

³ Husma, H. (2022). Konflik Kepentingan Pemerintah Aceh Timur Dalam Keterlambatan Pembangunan Jalan Indra Makmu Terhadap PT Medco (Studi Kasus jalan desa Blang Nisam). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7(1).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Namun dalam pembangunan infrastruktur tersebut tentu adanya proses agar pembangunan dapat terselenggara sesuai dengan kebutuhan. Proses tersebut adalah permintaan dari masyarakat kepada pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta, dalam proses tersebut tentu adanya kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan tentu adanya hambatan yang menjadikan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan maupun kualitas hasil pembangunan tidak memuaskan pengguna jalan. Namun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Banda Aceh selaku pihak yang memiliki tanggung jawab dan sebagai pelaksana pembangunan jalan lingkungan.

Sebagaimana permasalahan yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak aspek, berikut peneliti akan memaparkan beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi dalam mekanisme maupun proses dalam pembangunan jalan lingkungan.. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya mengatasi permasalahan kerusakan jalan yang menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan kondisi jalan yang berlubang. Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Cut Ahmad Putra, melalui Kabid Bina Marga, Ir. Salmah Maimunah, menjelaskan bahwa penanganan jalan rusak adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola jaringan jalan kota. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Namun, permasalahan jalan rusak tidak hanya terbatas pada ruas jalan kota, melainkan juga mencakup ruas jalan provinsi dan jalan nasional. Jalan provinsi

menjadi kewenangan Dinas PUPR Aceh, sementara jalan nasional menjadi tanggung jawab Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi menjadi hal penting dalam upaya penyelesaian kerusakan jalan yang lebih luas.

Dalam upaya pemeliharaan jalan, Dinas PUPR Kota Banda Aceh terus melaksanakan perbaikan dengan metode patching, yaitu mengganti material aspal yang rusak dengan aspal baru. Perbaikan ini dilakukan pada berbagai ruas jalan, termasuk jalan arteri sekunder, kolektor, dan jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Penanganan kerusakan jalan ini sangat penting mengingat dampaknya terhadap kenyamanan dan keselamatan Masyarakat.⁵

Dalam kasus lain Beberapa ruas jalan di Banda Aceh mulai mengalami kerusakan parah, dengan munculnya lubang-lubang yang membahayakan keselamatan pengendara. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kota dan provinsi. Ketua Komisi III DPR Kota Banda Aceh, Irwansyah, mengungkapkan bahwa jalan di Banda Aceh dikelola oleh berbagai pihak, termasuk jalan nasional, provinsi, kota, dan desa, sehingga perlu adanya kejelasan mengenai kewenangan pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah ibukota provinsi tersebut.

Pada tahun ini, DPRK Banda Aceh dan Pemkot Banda Aceh mengalokasikan Rp 3 miliar untuk pemeliharaan jalan, jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, anggaran tersebut masih dianggap tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan jalan kota yang cukup signifikan.

⁵<https://aceh.tribunnews.com/2024/11/14/dprk-sorot-jalan-berlubang-begini-tanggapan-dinas-pupr-banda-aceh>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 17.00 Wib.

Irwansyah juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Aceh dalam memperbaiki jalan provinsi yang ada di Banda Aceh, mengingat kota ini merupakan wajah dari Provinsi Aceh. Beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, seperti Jalan Teuku Nyak Arief dan Jalan Panglima Nyak Makam, terlihat memiliki lubang dengan ukuran dan kedalaman yang bervariasi. Pengendara harus berhati-hati dan memperlambat kendaraan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.⁶

Pada 24 Mei 2024, Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, meninjau kerusakan jalan di Jalan Mantri Zainun, Gampong Baro, yang disebabkan oleh truk pengangkut material pembangunan. Jalan sepanjang 200 meter tersebut mengalami kerusakan dan genangan air. Wali kota menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut, serta meminta pengawasan terhadap truk bermuatan berat. Perbaikan serupa akan dilakukan di ruas jalan lainnya, termasuk jalan prioritas untuk mendukung pelaksanaan PON XI 2024.⁷

Kemudian kasus yang juga peneliti temukan yaitu Kerusakan jalan di Dusun Musafir, Gampong Alue Naga, Banda Aceh, semakin parah akibat lalu lalang truk pengangkut material pembangunan perumahan. Warga setempat mengeluhkan kerusakan jalan yang terjadi karena tonase truk yang melebihi kapasitas jalan tersebut. Kepala Dusun Musafir, Muhammad, menyatakan bahwa meskipun pembangunan perumahan disambut baik, pengembang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut material.

⁶ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6534019/jalan-berlubang-di-banda-aceh-butuh-perhatian-serius>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 21.18 Wib.

⁷ <https://bandaacehkota.go.id/berita/38447/pj-wali-kota-tinjau-jalan-rusak-di-permukiman-warga.html>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 22.00 Wib.

Muhammad juga mengimbau agar pengembang segera memperbaiki kerusakan jalan dan mengurangi kapasitas muatan truk agar tidak menambah beban jalan. Ia berharap pengembang menyadari pentingnya tanggung jawab mereka terhadap infrastruktur yang rusak akibat aktivitas pembangunan. Selain itu, ia meminta dukungan pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan secara menyeluruh.⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada seorang staf bidang jalan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada tanggal 8 Maret 2024 terkait dengan mekanisme pembangunan jalan lingkungan kawasan pedesaan pada dinas terkait dengan menjelaskan beberapa data yang dibutuhkan peneliti, Responden M (44 tahun) mengatakan bahwa semua mekanisme pembangunan jalan lingkungan pedesaan oleh dinas terkait semuanya mengikuti standar atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari tahapan awal hingga tahapan evaluasi akhir pasti jelas dan terstruktur.⁹

Namun bagaimana dengan permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembangunan tersebut dapat terselesaikan?, M mengatakan setiap proses pembangunan pasti ada permasalahan yang terjadi tetapi dalam penyelesaian masalah tersebut pihak pelaksana menggunakan solusi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan dapat diterima baik oleh kalangan masyarakat (penerima manfaat). maka kalau berbicara tentang mekanisme tentu tidak bisa dikatakan berhasil

⁸ <https://apjn.net/headlines/ap-11395/kerusakan-jalan-utama-dusun-musafir-alue-nagan-parah-warga-minta-pengembang-perumahan-tanggung-jawab/2/>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025 pukul 23.30 Wib.

⁹ Wawancara dengan staf bidang jalan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada hari tanggal 8 Maret 2024.

sepenuhnya tetapi ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan aturan dan kebutuhan di lapangan kerja.¹⁰



Gambar 2. Jalan di Dusun Musafir, Gampong Alue Naga, Banda Aceh
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 1. Jalan Teuku Nyak Arief, Kota Banda Aceh
Sumber: Dokumentasi Peneliti

¹⁰ Wawancara dengan staf bidang jalan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada tanggal 8 Maret 2024.



Gambar 3. Jalan Mantri Zainun, Gampong Baro, Kota Banda Aceh

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh menemukan bahwa kasus pembangunan jalan di wilayah kota Banda Aceh terdapat pada gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh sejak tahun 2023 dan kini telah selesai dilakukan perbaikan dengan jenis material beton, aspal, dan paving blok. Namun dalam proses pengusulan dan pelaksanaan Pembangunan masih terdapat masalah yang kerap terjadi yaitu Pembangunan yang berjenis aspal tidak merata dan program usulan yang masih tertunda untuk dilakukan Pembangunan dengan motif kekurangan anggaran. Maka oleh karena itu peneliti menyimpulkan masalah utama yang dialami terkait permasalahan dalam Pembangunan adalah kekurangan anggaran.

Disisi lain dalam Pembangunan jalan berjenis material beton juga pernah tertunda akibat perubahan harga material kebutuhan sehingga berdampak terhadap proses Pembangunan yang maksimal dan harus dilakukan perubahan terhadap kebutuhan jumlah anggaran Pembangunan.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas peneliti ingin mengetahui apa saja faktor dan hambatan yang menyebabkan permasalahan tersebut dapat terjadi.

Dari beberapa kasus diatas peneliti ingin fokus terhadap mekanisme Pembangunan dan faktor penghambat dalam proses Pembangunan jalan lingkungan Kawasan perdesaan di wilayah kota Banda Aceh. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat permasalahan yang terjadi dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan ini.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa “Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan”

Untuk melakukan pembangunan jalan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan”.¹²

¹¹Hasil wawancara pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2024.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Temuan masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas pembagian kewenangan dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan di Banda Aceh, serta pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk menangani kerusakan jalan secara efektif.

Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana mekanisme pembangunan jalan lingkungan kawasan perdesaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam membatasi diri terhadap mekanisme pembangunan jalan lingkungan sebagaimana pembahasan latar belakang maka dirumuskan identifikasi sebagai berikut:

1. Mekanisme pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perdesaan wilayah kota Banda Aceh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh
2. Masih ditemukannya faktor penghambat pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perdesaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.

1.2.2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dari rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perdesaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor penghambat pembangunan jalan lingkungan kawasan perdesaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Perdesaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui penghambat pembangunan jalan lingkungan kawasan perdesaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Teoritis adalah dapat menjadi pedoman kepada masyarakat mengenai mekanisme dalam melakukan permohonan pembangunan jalan lingkungan yang benar. Serta menjadi sumber wawasan dan pengetahuan kepada seluruh pembaca.

2. Praktis

Praktis adalah menjadikan masyarakat yang memiliki kualitas dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui mekanisme pembangunan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

